

JURNAL ILMIAH

KUTEI

POLA TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA
KOMUNITAS LOKAL SUKU BESEMAH

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETELAH KELUARNYA KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003
DI DINAS KIMPRASWIL PROPINSI BENGKULU

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK
DI KOTA SURAKARTA

KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF
PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA
ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG
BERDASARKAN HUKUM PENGANGKUTAN UDARA
NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PENGEMBANGAN INSENTIF DAN SANKSI DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

JURNAL ILMIAH KUTEI



Penanggungjawab
Dekan FH Universitas Bengkulu

Wakil Penanggungjawab
Pembantu Dekan I FH Universitas Bengkulu

Pimpinan Redaksi
Herlita Eryke

Sekretaris Redaksi
Rhenny Wahyuni P ulungan

Dewan Redaksi
Prof Dr Juanda S.H.M.MH
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.S
Dr Taufiqurahman, S.H.M.H
Yamani Komar S.H.M.H
Amancik, S.H.M.H

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu
Telp. 0736 20653, 21184

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksi minimal 10 halaman dan maksimal 25 halaman dengan spasi ganda, disertai biodata penulis dan mengikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi tulisan.

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL ILMIAH KUTEI DAFTAR ISI PENGANTAR REDAKSI

POLA TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA KOMUNITAS LOKAL SUKU BESEMAH (Prof. Dr Herewan, S.H.M.S.)	1 - 21
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETELAH KELUARNYA KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 DI DINAS KIMPRASWIL PROPINSI BENGKULU (Edytiwarman, S.H.M.Hum)	22 -32
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KOTA SURAKARTA (Helda Rahmasari, S.H.M.H)	33- 50
KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI (Katemalaem S.Meliala, S.H.M.H)	51 -60
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG BERDASARKAN HUKUM PENGANGKUTAN UDARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Ema Septarina, S.H.M.H)	61 -76
PENGEMBANGAN INSENTIF DAN SANKSI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA (Edra Satmaidi, S.H.M.H)	77 -88

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETELAH KELUARNYA KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003
DI DINAS KIMPRASWIL PROPINSI BENGKULU

Oleh

Edytiawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang praktik pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa setelah keluarnya Keppres No.80 tahun 2003 dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Penentuan sample dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu sampel ditentukan dengan sengaja berdasarkan suatu pertimbangan tertentu dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu sudah mengikuti petunjuk-petunjuk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui kelemahan, kekurangan-kekurangan yang masih perlu di benahi dan diperbaiki oleh Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu. Adapun kendala-kendala yang ditemui adalah penyusunan jadwal rencana pelaksanaan proyek dengan penyerahan DIP tidak tepat waktu, sumber daya manusia yang terbatas, tidak adanya keseragaman dalam penetapan HPS suatu barang, klasifikasi dan kualifikasi penyedia jasa yang tidak obyektif dan ketidak mampuan penyedia jasa untuk memberikan jaminan pelaksanaan pemborongan pekerjaan.

PENDAHULUAN

Dalam pekerjaan pemborongan yang melibatkan pemerintah sebagai prinsipal, selain tunduk pada KUH. Perdata khususnya Buku III sebagai aturan umum dalam membuat perjanjian, juga harus mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instransi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Penelitian dan pembahasan tentang praktik pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa ini memiliki arti yang strategis, selain adanya tuntutan keterbukaan, tujuan dikelurkannya Keppres No. 80 Tahun 2003, ini mengandung tujuan-tujuan sebagaimana ditekankan dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan internasional.

1. Meningkatkan peran serta usaha kecil, koperasi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/jasa.
2. Meningkatkan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam mengadakan barang/jasa.
3. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek, panitia pengadaan, atau pejabat yang berwenang lainnya.
4. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

Selain ada tujuan yang tersurat di dalam Keppres No. 80/2003 seperti dituliskan di atas, di dalam praktik pelaksanaan pekerjaan, wajib mentaati aturan-aturan atau etika di dalam mengadakan barang/jasa seperti berikut ini:

1. Harus melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat..
4. Meningkatkan dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau berkaitan dengan barang/jasa.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu.
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut.

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian adalah seluruh Pemborong/Penyedia Jasa di Bengkulu yang melakukan kontrak kerja di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu. Sumber data meliputi : Buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, UU, PP, Keputusan Menteri, bahan-bahan hasil lokakarya, majalah ilmiah dan berbagai data statistik yang tersedia di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh dari lapangan, diolah dan diedit serta disusun secara sistematis. Data yang telah tersusun secara sistematis tersebut, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir baik secara induktif maupun secara deduktif, yaitu kesimpulan ditarik berdasarkan dari suatu pernyataan yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. Sehingga hasil analisis tersebut dapat memberikan suatu thesa yang baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pengadaan barang/jasa dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku (perjanjian standar). Dibuat secara baku karena menyangkut risiko yang besar, yaitu risiko keselamatan masyarakat secara luas dan risiko dalam keuangan yang dananya dari Pemerintah dan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Tentang isi yang harus dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pemerintah, menurut Pasal 27 Keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa dokumen kontrak sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan disertai dengan uraian yang jelas perihal jenis dan jumlah barang/jasa yang telah diperjanjikan.

2. Harus mencantumkan hak dan kewajiban para pihak-pihak yang telah terikat dalam perjanjian pemborongan.
3. Harga dalam kontrak pekerjaan yang disertai dengan syarat-syarat pembayarannya.
4. Persyaratan dan sertifikasi teknis yang jelas dan terinci dari barang/jasa yang diperjanjikan.
5. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan barang yang disertai dengan jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti beserta syarat-syarat penyerahannya.
6. Adanya jaminan teknis dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Mencantumkan sanksi apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
8. Mencantumkan cara-cara penyelesaian bilamana terjadi perselisihan diantara para pihak.

Apabila perjanjian itu berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK), maka dalam SPK itu sekurang-kurangnya harus memuat materi:

1. Pihak yang memerintahkan dan pihak yang menerima perintah pelaksanaan pekerjaan.
2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan diantara para pihak.
3. Harga yang telah ditetapkan dengan pasti serta syarat-syarat pembayarannya.
4. Persyaratan dan spesifikasi teknis.
5. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan.
6. Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Pasal 29 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003, jenis pekerjaan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan surat perintah kerja adalah jenis pekerjaan yang nilai kontraknya maksimal sebesar Rp 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah), dengan tanpa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ketentuan ini.

Demikian juga akan halnya perjanjian pemborongan bangunan. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH. Perdata di atas, harus memenuhi syarat-syarat lainnya seperti diatur dalam Bab V SKB Menteri Keuangan R.I dan Kepala BAPPEMAS No.5-42/A/2003 dan No. 5-2262/02/05/2003. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003. Yang menentukan adanya syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Lebih lanjut di dalam syarat-syarat umum dibagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus, yang dimaksud ketentuan umum adalah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk semua jenis kontrak/perjanjian, misalnya penjelasan tentang definisi, asal barang/jasa, jaminan asuransi, cara pembayaran, harga pekerjaan, amandemen kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan ketentuan khusus adalah ketentuan-ketentuan yang

hanya berlaku untuk salah satu jenis kontrak saja. Jadi ketentuan khusus ini tidak bisa diberlakukan untuk semua jenis kontrak, karena ketentuan ini disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

Ada tiga jenis ketentuan khusus yang diatur dalam Bab V SKB ini, yaitu ketentuan khusus yang mengatur tentang kontrak pengadaan barang dan ketentuan khusus yang mengatur tentang kontrak jasa konsultasi serta ketentuan khusus yang mengatur tentang kontrak jasa pemborong. Dapat disebutkan misalnya ketentuan khusus mengenai kontrak pengadaan barang mengatur mengenai standar barang, transportasi, cara pengepakan, pemeriksaan dan pengujian, layanan tambahan. Untuk ketentuan khusus kontrak jasa konsultasi mengatur tentang kewenangan anggota konsultan, kewajiban penyedia jasa, personil konsultan dan sub konsultan, tanggungjawab penyedia jasa, pemeriksaan keuangan dan lain-lain. Sedangkan ketentuan khusus mengenai kontrak jasa pemborongan mengatur tentang penilaian pekerjaan sementara, personil, kompensasi, penangguhan, penyesuaian harga dan lain-lain. Sedangkan untuk syarat-syarat khusus kontrak/perjanjian, juga di bagi menjadi dua bagian yang masing-masing mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus. Berbeda dengan syarat umum kontrak, maka ketentuan umum dalam syarat-syarat khusus ini hanya berupa tambahan-tambahan ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak seperti misalnya depinisi, asal barang dan jasa, jaminan, asuransi, cara pemborongan, hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain. Adapun ketentuan khusus dalam persyaratan khusus adalah menurut ketentuan-ketentuan tambahan yang masih perlu dicantumkan sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk masing-masing jenis pekerjaan. Misalnya untuk jenis kontrak pengadaan barang dapat menjelaskan jenis pelayanan tambahan yang diperlukan dan untuk kontrak pengadaan pekerjaan pemborongan dapat di tambah dengan hal-hal yang tergolong terjadinya kompensasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu, yaitu tentang praktik pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa adalah:

Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Pemborongan Pekerjaan

Berdasarkan data penelitian di lapangan perihal praktik pelaksanaan kontrak khususnya di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu dapat diuraikan berikut ini :

a. Mengenai Isi Kontrak, memuat :

- (1) Identitas para pihak, yang harus memuat secara jelas identitas para pihak (Pihak Pemborong dan Pihak Pemberi Pekerjaan).
- (2) Uraian Pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan terinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan dan batasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Masa Pertanggungan dan/atau Pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan/pemborong.
- (4) Tenaga Ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersangkutan.
- (5) Hak dan Kewajiban, yang memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, misalnya hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta memenuhi kewajibannya seperti tertuang dalam kontrak, serta hak penyedia jasa (Pemborong) untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, serta wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (6) Cara Pembayaran, yang memuat tentang kewajiban dan cara melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa (Pemberi Pekerjaan).
- (7) Cidera Janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- (8) Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian akibat ketiadaan kesepakatan.
- (9) Pemutusan perjanjian, yang memuat ketentuan tentang, pemutusan perjanjian kerja, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (10) Keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kehendak dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- (11) Perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
- (12) Komponen bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban menyediakan atau menyatakan komponen bangunan dan peralatan yang memenuhi standar.

Dalam praktik di lapangan juga ditemukan adanya kecenderungan pelanggaran kewajiban penyertaan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi serta penyediaan peralatan yang memenuhi standar, karena adanya keterbatasan dalam dua aspek di atas yang ada di Bengkulu.

b. Tentang Pelaksanaan Pekerjaan

Terhadap pemborong yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pekerjaan ada kewajiban harus melaksanakan pekerjaan konstruksi tetapi di dalam praktiknya, kepada pemborong atau rekanan yang dinyatakan menang ini tidak melaksanakan pekerjaannya.

melainkan dipindahtangankan kepada pihak lain atau pemborong lain secara tidak resmi atau di bawah tangan (*Non Legal Aspect*) sedangkan untuk menggugat, sampai saat ini pihak pemberi pekerjaan belum dapat menemukan aturan hukumnya, sebab secara resmi yang menyelesaikan administrasi tetap pemborong yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Selain itu, terdapat data yang menunjukkan bahwa sering terjadi kelambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh penyimpangan penggunaan uang muka kerja. Kebanyakan para pemborong tergolong pemborong yang tidak cukup modal dan untuk mengerjakan menunggu uang muka kerja. Sebaliknya apabila uang muka kerja sudah turun sebesar 20 % dari harga kontrak, penggunaan uang muka itu tidak benar sehingga dapat mengganggu pekerjaan awal suatu proyek. Seperti mendatangkan material, peralatan dan manajemen proyek. Kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata sering sekali dilakukan proses rekayasa ulang (*review desain*) sehingga dalam satu pekerjaan dapat terjadi lebih dari satu kali pembuatan addendum kontrak. Sebagai proses pekerjaan tambah kurang, (*contract change order*). Hal ini disebabkan karena system yang digunakan di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu menggunakan sistem Kontrak Harga Satuan (*unit price contract*). Di samping itu di dalam menetapkan dan mengesahkan harga perhitungan sendiri untuk suatu proyek sangat tergantung dengan Pemimpin Proyek dan Panitia lelang.

c. Kepanitiaan Lelang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penunjukan personil-personil sebagai panitia lelang kurang tepat dan tidak memenuhi persyaratan pokok yang dikehendaki Keppres No. 80 tahun 2003, perihal kemampuan seseorang untuk menduduki kepanitiaan pelelangan tender.

d. Pengawasan Pekerjaan

Dalam melakukan evaluasi hasil pekerjaan ini lebih dititikberatkan terhadap asas manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan. Ini juga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja, baik terhadap pengguna jasa, maupun pihak penyedia jasa. Pengawasan atau penilaian terhadap pengguna jasa atau pemberi pekerjaan ini meliputi aspek administrasi dan teknis pengelolaan proyek. Dari segi administrasi, dinilai atau

diawasi dalam ketaatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak serta administrasi keuangan. Sedangkan dari sisi penyedia jasa atau kontraktor digunakan digunakan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja, yang secara teknis harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa untuk pengelolaan administrasi proyek dan administrasi keuangan, telah dilakukan dengan benar. Sedangkan dari sisi pemborong terdapat beberapa paket proyek di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu, terdapat beberapa pemborong yang setelah dievaluasi menunjukkan kinerja yang kurang (2 kontraktor), cukup (empat kontraktor) dan baik (empat kontraktor). Diantara sepuluh kontraktor golongan menengah dan besar. Dari hasil penelitian juga diperoleh data bahwa hasil evaluasi yang dilakukan ini selanjutnya dikirim ke induk organisasi (LPJK) atau Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi untuk penilaian sertifikasi di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa paket kontrak di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu, terdapat beberapa paket kontrak yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan telah dikenakan sanksi denda dan ada dua buah paket kontrak yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak karena tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Di samping sanksi denda seharusnya bagi penyedia jasa yang dapat menyelesaikan pekerjaan mendahului dari jadwal waktu yang telah ditentukan seharusnya mendapat imbalan dan hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemborongan di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan tidak selalu tepat waktu, hal tersebut disebabkan antara waktu penyerahan Daftar Isian Proyek (DIP) dengan pengangkatan pejabat, pemimpin proyek tidak bersamaan sehingga waktu dari jadwal yang telah ditentukan dalam DIP/PO (Petunjuk Operasional) dan hal ini akan mengurangi waktu yang tersedia dalam satu tahun anggaran (kurang dari satu tahun).

- b. Dalam hal menyangkut atau menunjuk panitia pengadaan barang dan jasa sangat terbatas sekali sumber daya manusia yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa. Mengingat petunjuk pengadaan barang dan jasa yang telah dikeluarkan relatif baru dan belum diterbitkan petunjuk pelaksanaan Departemen Kimpraswil sebagaimana Keppres-Keppres sebelumnya.
- c. Di dalam menetapkan dan mengesahkan harga perhitungan sendiri (HPS) masih banyak mengandung kelemahan, karena pengaruh fluktuasi harga pada masing-masing lokasi sangat berbeda sehingga keobyektifan HPS sangat tergantung dari masing-masing Pemimpin Proyek dengan Panitia.
- d. Dalam proses Pra Pelelangan yaitu pada tahapan klasifikasi dan pra kualifikasi bagi penyedia jasa pemborongan pada pengguna jasa dihadapkan pada kondisi yang serba sulit. Mengingat tingkat kemampuan penyedia jasa dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki pada kenyataannya tidak sesuai, sedangkan yang memberikan sertifikasi dari institusi lain, apalagi sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Penggolongan Penyedia Barang dan Jasa intervalnya cukup besar yaitu : Usaha Kecil (K1/K2) < 1 Milyar, Golongan Menengah (M1/M2) 1 – 10 Milyar dan Golongan Besar (B) > 10 Milyar. Kendala lain yang dihadapi pada proses pelelangan yang dihadapi kebanyakan para pemilik perusahaan yang sah hanya mengikuti sampai proses tahap penawaran saja, sedangkan tahap selanjutnya sering dipindah tangankan secara tidak resmi (*Non Legal Aspect*).
- e. Kendala yang dihadapi oleh para penyedia jasa yang kondisi keuangannya kurang baik, biasanya sulit untuk menyiapkan jaminan khususnya apabila dari perbankan, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pihak perbankan banyak dirugikan/adanya kredit macet sehingga persyaratan perbankan semakin diperketat dan banyak para penyedia jasa menghubungi jasa keuangan lainnya yaitu melalui perusahaan asuransi. Kendala lain yang dihadapi penyedia jasa setelah menerima uang muka tidak segera mengelola penggunaan uang muka tersebut secara benar, sehingga kegiatan pekerjaan di lapangan mengalami

hambatan (material, peralatan dan pengelolaan proyek) dan ada kecenderungan tidak profesional yang seharusnya uang muka dipergunakan untuk membiayai pekerjaan awal proyek, pada kenyataannya untuk kegiatan yang lain dan kesulitan bagi pengguna jasa (Pemimpin Proyek) untuk mengontrol secara langsung terhadap penggunaan uang muka tersebut. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar penyedia jasa sangat tergantung dari pemberian uang muka untuk modal kerja dan jarang sekali mereka kerja tanpa uang muka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam di atas, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2003 telah mengikuti petunjuk-petunjuk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003, meskipun dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang perlu dibenahi dan disempurnakan diantaranya penentuan harga satuan proyek yang menggunakan system Harga Perhitungan Sendiri (HPS) cenderung tidak obyektif, sosialisasi kurang, sering dilakukan proses pekerjaan tambah atau kurang (*contract change order*), penuangan isi kontrak/perjanjian belum konsisten dilaksanakan terutama mengenai personil atau tenaga ahli dan peralatan yang tidak memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan dalam Keppres tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut adalah :
 - a. Dalam menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan dengan penyerahan Daftar Isian Proyek (DIP) tidak selalu tepat waktu.
 - b. Dalam hal penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa sangat terbatas sekali sumber daya manusia yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

- c. Di dalam menetapkan dan mengesahkan harga perhitungan sendiri (HPS) masih banyak mengandung kelemahan, karena pengaruh fluktuasi harga pada masing-masing lokasi sangat berbeda sehingga keobyektivan HPS sangat tergantung dari masing-masing Pemimpin Proyek dengan Panitia.
- d. Tingkat kemampuan penyedia jasa dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki pada kenyataannya tidak sesuai, sedangkan yang memberikan sertifikasi itu dari institusi lain.
- e. Penyedia jasa sulit menyediakan jaminan yang setara dengan harga proyek yang diajukan kepada Pemimpin Proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian dengan Pemerintah, dalam Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1992.
- , *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.
- , *KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*.